

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prancis merupakan negara yang berbentuk republik. Dan beribukota di Paris nama resmi negara Prancis adalah France Republic, secara geografis Prancis terletak di Barat laut benua Eropa dan merupakan negara terluas di benua Eropa. (Muliwana, 2017) Negara Prancis sendiri memiliki peran yang sangat penting dikancah politik internasional. Prancis merupakan salah satu negara dengan kekuatan ekonomi internasional, dan sering disamakan dengan negara seperti Jepang, Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris. Prancis merupakan salah satu anggota Dewan Keamanan PBB. Pada saat ini Prancis telah menjadi aktor utama dalam politik internasional. Dimana Prancis sering ikut terlibat dalam usaha perdamaian dalam berbagai konflik. (Flower, Bisson, & Blondel, 2018)

Prancis sendiri telah beberapa kali terlibat dalam konflik yang terjadi di benua Afrika, dimana banyak terdapat negara-negara bekas jajahan Prancis di benua Afrika pada masa kolonial. Prancis sendiri pernah ikut terlibat di konflik Pantai Gading, Mali, dan Republik Afrika Tengah. Di Republik Afrika Tengah sendiri Prancis berperan penting dalam konflik etno-politik antara kaum mayoritas Kristen (Anti-Balaka) dengan kaum minoritas Islam (Seleka). Dalam perjalanannya, Republik Afrika Tengah sempat berubah konstitusi menjadi kekaisaran. Akan tetapi hal itu tidak berjalan lama hanya berselang dua tahun, hanya dari 1976 sampai 1979 dan juga diwarnai berapa kali kudeta dalam memperebutkan kekuasaan.

Kelompok Pemberontak Seleka terbentuk pada 2012 yang pada awalnya adalah sebuah aliansi yang didukung oleh tiga faksi utama, yaitu: *The Covention*

Patriotique da Salut du Kodro (CPSK), The Convention des Patriotes Pour la Justice et la Paix (CPJP-Fondamentale), dan The Union des Forces Democratiquess Pour le Rassemblement (UFDR), Michel Djotodia dipilih sebagai pemimpin kelompok pemberontak Seleka. Dan milisi Anti-Balaka terbentuk pada 2013 sebagai akibat dari tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Seleka kepada warga sipil, dan kurang memiliki struktur komando yang jelas. (Dukhan, The Central African Republic crisis, 2016)

Pemicu terjadinya konflik di Republik Afrika Tengah adalah rasa tidak puas terhadap pemerintahan Francois Bozize yang dinilai diskriminatif dan menjalankan politik patronase. Hal tersebut membuat kesenjangan ekonomi, politik, dan sosial yang tinggi antara orang-orang wilayah utara dengan orang-orang wilayah selatan negara tersebut. Francois Bozize lebih suka memilih keluarga atau kelompok tertentu untuk memegang posisi-posisi penting di pemerintahan. Francois Bozize juga lebih mementingkan orang-orang dari wilayah selatan dalam hal pelayanan publik untuk kepentingan sendiri. Membuat orang-orang dari Utara tersisihkan dari pemerintahan. Kelompok Seleka merupakan kelompok pemberontak yang berbasis dari bagian utara negara tersebut. Selama perjalanannya konflik perebutan kekuasaan telah menjadi konflik yang membawa isu agama antara muslim dan Kristen untuk memobilisasi massa demi kepentingan penguasa politik. (Siradağ, 2016)

Konflik di Republik Afrika Tengah ini dimulai pada 10 Desember 2012, dimana kelompok pemberontakan Seleka memulai serangannya kepada pemerintahan di ibukota Republik Afrika Tengah yaitu Bangui, dalam upaya pemberontakannya kelompok pemberontak Seleka banyak melakukan pelanggaran HAM, seperti melakukan pemerkosaan, pembunuhan, penjarahan, dan pembakaran tempat tinggal terhadap warga sipil yang mayoritas beragama Kristen. Hanya diperlukan waktu lebih satu

bulan bagi kelompok pemberontakan Seleka untuk menguasai ibukota Republik Afrika Tengah yaitu Bangui. Pada 11 Januari 2013, memaksa Presiden Francois Bozize menandatangani perjanjian damai Libreville untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional. (Dukhan, The Central African Republic crisis, 2016)

Gambar 1.1 Peta Negara Republik Afrika Tengah



Sumber: The Central African Republic Crisis

Tetapi perjanjian damai ini hanya bertahan sementara, karena pada 24 Maret 2013 kelompok pemberontak Seleka melanggar perjanjian dan melakukan kudeta, serta mengambil alih ibukota Bangui, yang memaksa presiden saat itu Francois Bozize kabur melarikan diri ke Kamerun, dan Michel Djotodia yaitu pemimpin dari kelompok pemberontak Seleka memproklamirkan dirinya sebagai presiden Republik Afrika Tengah yang baru. Namun dalam masa kepemimpinan Michel Djotodia, kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok Seleka terus terjadi dan tak terkendali kepada warga sipil yang beragama Kristen. Hal ini akan menjadi cikal bakal kerusuhan yang lebih besar. Pada 13 September 2013 Michel Djotodia mengumumkan pembubaran Seleka, tetapi hal tersebut tidak dapat mencegah kekerasan yang

dilakukan oleh pemberontak Seleka. Pada 5 Desember 2013 milisi Anti Balaka mengkoordinasikan serangan terhadap penduduk sipil muslim di ibukota, lebih dari 1000 warga sipil meninggal. (Dukhan, *The Central African Republic crisis*, 2016)

Pada tanggal 10 Januari 2014 Michel Djotodia dipaksa mundur dari jabatannya oleh tekanan komunitas regional *Economy Country of Central Africa States* (ECCAS). Masih dalam bulan yang sama yaitu, pada 23 Januari 2014 Republik Afrika Tengah membentuk dewan transisi pemerintahan dan Catherine Samba Panza dipilih untuk memimpin pemerintahan transisi sampai diadakan pemilihan umum pada Januari tahun 2016. Tetapi dalam masa pemerintahan transisi banyak terjadi kendala yang dihadapi, karena benih kebencian telah tersulut sejak mundurnya Michel Djotodia. Milisi Anti Balaka juga melakukan penyerangan terhadap kaum Muslim minoritas yang dianggap sebagai antek-antek kelompok pemberontak Seleka. (Dukhan, *The Central African Republic crisis*, 2016)

Prancis berusaha mempertahankan pengaruhnya dibekas negara-negara jajahannya di benua Afrika, dengan cara mempertahankan hubungan politik dan ekonomi dengan negara-negara bekas jajahannya. Salah satunya di Republik Afrika Tengah. Prancis beberapa kali terlibat dalam politik di Republik Afrika Tengah. Tidak ada seorangpun yang menjadi presiden di Republik Afrika Tengah tanpa dukungan Prancis. (Sıradağ, 2016) Prancis merupakan satu-satunya negara Eropa yang memiliki kedutaan di Bangui. Prancis memiliki hubungan bilateral yang telah lama dan kuat dengan Republik Afrika Tengah dan dengan tingginya intensitas kunjungan bilateral antara Prancis dan Republik Afrika Tengah. Prancis juga mendukung pemilu di Republik Afrika Tengah dalam upaya Prancis untuk menstabilkan dan membangun Republik Afrika Tengah. Dengan mempertimbangkan

hubungan yang erat antara Prancis dan Republik Afrika Tengah, maka Prancis merasa perlu terlibat dalam konflik ini. (Diplomatie, France and the Central African Republic, 2018)

B. Rumusan masalah

Terkait dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, pokok permasalahan yang dapat diambil yaitu: **Bagaimana upaya Prancis dalam menyelesaikan konflik etnopolitik di Republik Afrika Tengah?**

C. Kerangka Konseptual

Dalam mempermudah penulis untuk menganalisis judul yang diatas maka, penulis menggunakan konsep:

1. Konsep intervensi

Menurut Jack C. plano & Roy Olton intervensi merupakan campur tangan yang bersifat koersif dalam urusan Sebuah negara lain atau kelompok negara bagian lain. Yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan negara lain baik kebijakan internal maupun eksternal. Dalam hukum internasional intervensi dapat dibenarkan secara hukum:

1. Jika campur tangan sebuah negara telah diberikan hak oleh suatu perjanjian.
2. Jika sebuah negara melanggar kesepakatan penentuan kebijakan Bersama dan bertindak secara sepihak.
3. Jika tindakan intervensi diperlukan untuk melindungi warga negara.
4. Jika perlu pembelaan diri
5. Jika suatu negara melanggar suatu hukum internasional.

Tindakan intervensi juga dibenarkan oleh piagam PBB, jika suatu negara melakukan sebuah tindakan

kollektif masyarakat internasional jika bertujuan menghancurkan kedamaian dan melakukan tindakan agresif. (Plano & Olton, 1988)

2. *Third party intervention*

Dalam buku "*In the Turbulent Peace: The Challenges of Managing International Conflict's*" karya Fen Osler Hampson, konsep intervensi oleh pihak ketiga menawarkan empat sudut pandang yang berbeda. Ada dua poin penting yang menjelaskan tentang konsep "*Third Party Intervention*", yaitu: pertama, adanya keterkaitan antara pihak ketiga dengan penyelesaian konflik oleh akademisi atau suatu analisis kebijakan. Kedua terdapat empat pendekatan yang mana masing-masing pendekatan memiliki elemen yang saling melengkapi, seperti penyebab konflik antar kelompok. (Hampson, 2001)

Ada empat pendekatan yang ditawarkan, yaitu: *Hard Realism*, *Soft Realism*, *Governance-based*, dan *Social-Psycological*, dan masing-masing pendekatan memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana suatu konflik etnis atau sektarian bisa muncul termasuk bagaimana penyelesaiannya, dan juga termasuk cara mengintervensinya. *Hard & Soft Realism* berfokus pada *Security Dilemmas* dan faktor-faktor strategis dalam konflik antar kelompok juga etnis, sedangkan *governance-based & social-psychological* berfokus pada pelanggaran HAM dan *Victimization* (pengorbanan).

Tabel 1.1 Empat Pendekatan Dalam Third Party Intervention

Pendekatan intervensi	Penyebab kemunculan konflik	Strategi penyelesaian konflik	Pihak ketiga yang mengintervensi
<p>Hard Realism</p> <ul style="list-style-type: none"> - The Actors; Kenneth Waltz, Richard Haass, Kaufmann 	<p>Kekacauan domestik, dilema keamanan yang didorong oleh hiper nasionalisme dan mobilisasi politik, perilaku strategis, dan salah perhitungan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak melakukan apa-apa dan tidak melakukan intervensi - Pemisahan - membendung - merubah power balances via militer dan dukungan atau boikot dan sanksi 	<p>Great powers</p>
<p>Soft Realism</p> <ul style="list-style-type: none"> - The Actors; Lijphart, Donald Horowitz, William Zartman 	<p>Kekacauan domestik, dilema keamanan yang didorong oleh hiper nasionalisme dan mobilisasi politik, perilaku strategis, dan salah perhitungan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mediasi dan diplomasi koersif - Peacekeeping, peacemaking, dan tindakan membangun kepercayaan lainnya yang mengurangi insentif untuk melanggar kesepakatan yang telah dinegosiasikan. - Membagi kekuatan dan akomodasi politik - Isolasi 	<p>Great powers and middle powers, organisasi internasional dan regional</p>
<p>Governance-Based Approaches</p> <ul style="list-style-type: none"> - The Actors; Paul-LaRose Edwards 	<p>Sumber konflik berawal dari pelanggaran HAM, adanya ketidakadilan dalam proses hukum, dan tidak adanya institusi yang demokratis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemulihan aturan hukum - pemilihan - membangun institusi demokrasi (meberi dukungan kepada partai politik) - Tata kelola pembagian kekuasaan dan partisipasi di 	<p>Organisasi internasional dan regional; LSM; kelompok sosial lainnya</p>

		kalangan kelompok sosial dan komunal yang berbeda - Pemulihan kelompok masyarakat	
Social-psychological Approaches - The Actors; Harold Saunders, Joseph Montville	Sumber konflik bersifat psikologis dan didasarkan pada citra musuh yang sudah tertanam dan perasan akan <i>victimizations</i>	- Pelaku harus menerima tanggung jawab atas tindak kekerasan sebelumnya - Memaafkan dan pemulihan - Penyuluhan dalam penyelesaian masalah - Negosiasi - Pelatihan dalam penyelesaian perselisihan	Scholar-practitioner, resolusi konflik LSM; kelompok-kelompok agama

Sumber: In the Turbulent Peace: The Challenges of Managing International Conflict's, P. 398

Bedasarkan tabel diatas ada empat pendekatan yang berbeda. Dalam ini akan membantu penulis dalam menganalisis konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah. Maka dari itu penulis menggunakan pendekatan *soft realism* untuk menjelaskan upaya Prancis sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik etnopolitik di Republik Afrika Tengah. Karena pendekatan *soft realism* lebih menekankan pada terciptanya perdamaian. Juga melakukan tindakan *peacekeeping* membagi kekuasaan, mediasi, dan diplomasi koersif. Prancis melakukan tindakan *peacekeeping* di Republik Afrika Tengah dalam strategi penyelesaian konflik Di Republik Afrika Tengah.

3. *Peacekeeping*

Peacekeeping adalah teknik yang dikembangkan untuk menjaga perdamaian dan juga untuk membantu mengawasi hasil perjanjian damai. Selama bertahun-tahun operasi *Peacekeeping* telah banyak berubah dari hanya menggunakan militer sebagai alat utama untuk memisahkan pihak-pihak yang berkonflik menjadi sesuatu bentuk yang lebih kompleks yang banyak melibatkan element-element seperti: militer, polisi, dan sipil untuk menjalankan operasi *Peacekeeping*. Operasi *Peacekeeping* tidak hanya untuk menjaga perdamaian dan keamanan tetapi juga untuk memfasilitasi proses politik dan melindungi warga sipil, melakukan *disarmament*, mendukung proses konstitusional, pemilihan umum, melindungi dan mempromosikan HAM, memulihkan peraturan perundang-undangan, dan memperluas kewenangan negara yang sah. (Nations, United Nations *Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines*, 2008)

Tujuan diadakan operasi *Peacekeeping* adalah:

- a. Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil serta memperkuat kapasitas negara dalam menyediakan keamanan dengan bertanggungjawab penuh terhadap hukum dan HAM.
- b. Memfasilitasi suatu proses politik dengan mengusulkan dialog dan rekonsiliasi. Serta mendukung suatu institusi pemerintahan yang sah dan efektif.
- c. Menyediakan kerangkakerja yang memastikan bahwa semua anggota PBB dan aktor organisasi internasionalnya ikut serta terlibat dalam aktivitsas dalam suatu negara.

Dalam upaya untuk menyelesaikan konflik dan melindungi warga negara Prancis telah melakukan

berbagai upaya. Dengan salah satu cara yaitu mengadakan Operasi Sangaris dan mengirimkan 2000 personil angkatan bersenjata ke Republik Afrika Tengah. (Dukhan, The Central African Republic crisis, 2016) Operasi Sangaris yang diluncurkan pada 5 Desember 2013. Operasi ini bertujuan untuk melindungi masyarakat sipil dari ancaman genosida akibat konflik antara Seleka dan Anti Balaka, melakukan *disarmament* antara pihak-pihak yang berkonflik. Membantu dan dukung operasi *peacekeeping* MISCA (*African Union*) dan operasi *peacekeeping* MINUSCA (*United Nations*). Prancis juga meminta bantuan dan dukungan negara-negara sekutunya untuk ikut terlibat dalam Operasi Sangaris dikonflik Republik Afrika Tengah. (Lichfield, 2018).

D. Hipotesis

Bedasarkan latar belakang masalah dan kerangka konseptual yang sudah dijelaskan sebelumnya, upaya Prancis dalam menyelesaikan konflik etnopolitik di Republik Afrika Tengah yaitu:

1. Prancis mengadakan Operasi Sangaris yang bertujuan untuk melindungi warga negara, melakukan *disarmament* terhadap kelompok-kelompok yang berkonflik, memfasilitasi proses politik, dan meminta bantuan kepada negara-negara sahabat.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah penulis ingin mengetahui Bagaimana upaya Prancis dalam menyelesaikan konflik etnopolitik di Republik Afrika Tengah.

F. Batasan Penelitian

Untuk membatasi pembahasan pada penelitian ini “UPAYA PRANCIS DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK ETNOPOLITIK DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH 2013-2016”, maka dalam tulisan ini penulis mengambil rentang waktu dari tahun 2013 dimana konflik keagamaan di Republik Afrika Tengah dimulai hingga tahun 2016. Akan tetapi penulis tidak akan menutup kemungkinan untuk membuat data-data yang relevan dari tahun sebelumnya.

G. Metode penelitian

1. Metode Analisis

Berdasarkan pertanyaan yang di rumuskan oleh penulis pada bagian selanjutnya, maka penulis dalam tulisan ini menggunakan metode deskriptif. Metode ini bertujuan untuk mengetahui upaya Prancis dalam menyelesaikan konflik etnopolitik di Republik Afrika Tengah 2013-2016

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data berupa tela'ah pustaka yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Seperti buku teks, jurnal, dokumen, makalah, serta menggunakan sumber dari internet seperti artikel dalam jurnal online dan berita yang memiliki memiliki relevansi dengan topik penelitian. Berbagai data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang dirumuskan sebelumnya

H. Sistematik Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian yang berjudul “UPAYA PRANCIS DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK ETNOPOLITIK DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH 2013-2016” ini adalah:

- Bab I** Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
- Bab II** Dalam bab ini penulis akan menjelaskan hubungan Prancis dengan Republik Afrika Tengah
- Bab III** Dalam bab ini penulis akan menjelaskan sejarah konflik di Republik Afrika Tengah
- Bab IV** Dalam Bab ini penulis Akan menjelaskan upaya-upaya Prancis di Republik Afrika Tengah
- Bab V** Kesimpulan Bab ini merupakan kesimpulan dan penutup